

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprita, Serlika. *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU*. Makassar: Pena Indis, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum: Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung, CV Mandar Maju, 2001.
- Eddy, Richard. *Aspek Legal Properti: Teori, Contoh, dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Halim, A. Ridwan. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2016.
- Hartono, Sri Redjeki. *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi yang Berwawasan Asas Keseimbangan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisiun, 1982.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*. Jakarta: Grafiti, 2010.
- _____. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Manan, Syamsudin, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiarej. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Red & White Publishing, 2023.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012.
- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

_____. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara, dan Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Penelitian/Jurnal/Tugas Akhir

Aditya, Tjokorda Agung Candra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 3, (September 2021): 198.

Arief, Moh. Zainal. "Pelindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.", *Paper Prosiding Fakultas Hukum Universitas Wiraraja*, (Oktober 2016): 301.

Aprita, Serlika, Devi Sri Astuti, Siti Sarah, Lulu Larasari, and Diah Pitaloka Harin. "Analisis Jaminan Perorangan (*Personal Guarantor*) Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2023): 54-66.

Buana, Mirza Satria. "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi", Tesis Program Magister, Universitas Islam Indonesia, 2010.

Disemadi, Hari Sutra dan Daniel Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia.", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA* Vol. 9, No. 1, (Februari 2021): 129.

Djati, Daniel Mulia, Dwi Jatmiko, Dedi C. dan Orpa Lintin. "Kajian Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.", *Jurnal Ikamakum*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2022): 13.

Eliyana. "Konsep Dasar dan Aspek Hukum dari Kepailitan.", Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, *Pusat Pengkajian Hukum*, 2005.

Hayati, Kemala Atika, Tan K., Dedi H. dan Hasim P. "Hak Suara Kreditor Separatis dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”, *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2016): 120.

Hindrawan, Prayogo et.al., “Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, Issue 8, (Agustus 2023): 724.

Irianto, Catur. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, (November 2015): 414.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. ”Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2019): 14.

Kenting, Yohanes Alexander dan Hizkia D. Parulian. “Kedudukan Kreditor Separatis terhadap Rencana Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”, *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, Vol. 5, No. 2, (Februari 2022): 25.

Meuwissen, “Teori Hukum”, *Majalah Hukum Pro Justitia*, No. 2, 1994.

Muryati, Dewi Tuti, Dhian S. dan Efy Y. “Pengaturan Tanggung Jawab Kurator terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dala Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis.”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 1. (Juni 2017): 15.

Nugroho, Dedy Muchti. “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Perdata berdasar Asas Peradilan Yang Baik.”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 10, No. 01, (Mei 2017): 9.

Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia.”, *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, (Juni 2016): 40.

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, (Juni 2016): 194.

Rahmawati, Rizka. “Eksekusi Aset Debitor yang Berada di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan.”, *Jurnal SASI*, Vol. 25, No. 2, (Desember 2019): 127.

- Retnaningsih, Sonyendah. "Pelindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia.", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2017): 9.
- Romdoni, Farih. "Perlindungan Debitor dan Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Di Indonesia, Reformasi Pengajuan Permohonan PKPU, Perdamaian, dan Pembatalan Perdamaian", Disertasi Program Doktor, Universitas Indonesia, 2012.
- Silalahi, Udin dan Beatrix Tanjung. "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi.", *Undang: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Simanjuntak, Herry Anto. "Prinsip-Prinsip dalam Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Debitur kepada Kreditor.", *Jurnal Justika*, Vol. 02, No. 02, (Oktober 2020): 23-24.
- Suganti, Erman. "Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal", Skripsi Program Sarjana, Universitas Internasional Batam, 2019.
- Sularto. "Pelindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan", *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 2, (Juni 2012): 243.
- Suparti, Anik. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga No. 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap PT Goro Batara Sakti", Skripsi Program Sarjana, Universitas Lampung, 2010.
- Tarigan, M. Tommy Umoro. "Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis dalam Permasalahan Kepailitan terkait Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU", Tesis Program Magister, Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Tejaningsih, Titik. "Pelindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", Disertasi Program Doktor, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Oktober 2007): 338.

Yustiana, Yustiana. "Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Bank." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, (Mei 2020): 77-97.

D. Internet

Hukum Online, "Pelindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=3>, diakses 30 Januari 2024.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn, perihal Pengesahan Perjanjian Perdamaian, tanggal 30 September 2022.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, perihal Pembatalan Perjanjian Perdamaian, tanggal 17 April 2017.

F. Wawancara

Nien Rafles Siregar, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Pelindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Yang Menolak Rencana Perdamaian, *Hasil Wawancara*, Jakarta, 11 Juni 2024.

Irdinta Nurhabsari, Litigation Senior Manager PT Bank KEB Hana Indonesia, Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Kreditor Separatis Yang Menolak Rencana Perdamaian Untuk Meminimalisir Potensi Kerugian, *Hasil Wawancara*, Jakarta, 3 Juni 2024.